Profil dan Proyeksi Gender Aparatur Sipil Negara di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang (2024-2025)

Bagian 1: Konteks Demografi Kepegawaian: Analisis Komparatif Tingkat Nasional dan Kabupaten

Untuk memahami komposisi gender di dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BKBP) Kabupaten Bengkayang, analisis tidak dapat dilakukan secara terisolasi. Profil kepegawaian lembaga ini merupakan mikrokosmos dari tren demografis yang lebih luas, baik di tingkat kabupaten maupun nasional. Data yang tersedia menunjukkan adanya fenomena yang konsisten dan signifikan: feminisasi birokrasi, di mana Aparatur Sipil Negara (ASN) perempuan kini menjadi mayoritas. Kondisi ini membentuk konteks fundamental yang menjadi dasar bagi setiap estimasi dan proyeksi terkait BKBP.

Data statistik kepegawaian nasional yang dirilis oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) per 31 Desember 2023 menunjukkan bahwa dari total ASN di Indonesia, 56% adalah perempuan. Secara absolut, jumlah ASN perempuan mencapai 2.492.982 orang, melampaui jumlah ASN laki-laki yang tercatat sebanyak 1.972.786 orang (44%). Angka ini bukan sekadar anomali statistik, melainkan cerminan dari pergeseran sosio-ekonomi yang mendalam di mana sektor publik telah menjadi salah satu jalur karier utama bagi perempuan terdidik di Indonesia. Faktor-faktor seperti jaminan kerja, stabilitas pendapatan, dan persepsi keseimbangan kerja-hidup yang lebih baik dibandingkan sektor swasta kemungkinan besar berkontribusi pada tren ini.

Tren nasional ini ternyata tereplikasi dengan akurasi yang tinggi di tingkat lokal. Data Pemerintah Kabupaten Bengkayang per 31 Desember 2022, setahun sebelum data nasional dirilis, menunjukkan komposisi yang sangat serupa. Dari total 4.461 pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten, sebanyak 2.427 orang (54,4%) adalah perempuan, sementara 2.034 orang (45,6%) adalah laki-laki. Keselarasan antara data nasional (56% perempuan) dan data Kabupaten Bengkayang (54,4% perempuan) menegaskan bahwa dominasi perempuan dalam korps ASN bukanlah fenomena yang terbatas pada pusat pemerintahan atau kota-kota besar, melainkan sebuah realitas yang merata hingga ke tingkat daerah.

Konsistensi ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor yang mendorong partisipasi perempuan dalam birokrasi bersifat sistemik dan berlaku secara luas di seluruh Indonesia, termasuk di Bengkayang. Oleh karena itu, setiap analisis terhadap komposisi gender di BKBP harus dimulai dengan asumsi dasar bahwa lembaga tersebut kemungkinan besar juga memiliki mayoritas pegawai perempuan. Dengan demikian, fokus analisis bergeser dari pertanyaan sederhana "Apakah ada perempuan di BKBP?" menjadi pertanyaan yang lebih substantif: "Di posisi dan fungsi manakah perempuan terkonsentrasi di dalam struktur

organisasi BKBP, dan apakah representasi numerik ini setara dengan pengaruh dalam pengambilan keputusan?"

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, perbandingan data tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1: Perbandingan Komposisi Gender Aparatur Sipil Negara (ASN) Nasional (2023) dan Kabupaten Bengkayang (2022)

Yurisdiksi	Tahun Data	Total ASN	Jumlah ASN Laki-laki	Persentase Laki-laki	Jumlah ASN Perempuan	Persentase Perempuan	Sumber
Nasional	2023	4.465.768	1.972.786	44%	2.492.982	56%	
Kabupaten Bengkayang	2022	4.461	2.034	45,6%	2.427	54,4%	

Tabel ini secara visual memperkuat argumen bahwa BKBP Kabupaten Bengkayang beroperasi dalam sebuah ekosistem kepegawaian yang secara definitif didominasi oleh perempuan. Latar belakang demografis ini menjadi titik tolak krusial untuk membangun model estimasi yang realistis dan merumuskan proyeksi yang akurat untuk tahun-tahun mendatang.

Bagian 2: Profil Institusional BKBP Kabupaten Bengkayang: Struktur, Mandat, dan Kepemimpinan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BKBP) Kabupaten Bengkayang merupakan lembaga perangkat daerah yang memiliki posisi strategis dalam arsitektur pemerintahan lokal. Sebagai unsur pelaksana pemerintah kabupaten, BKBP bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif berada di bawah pembinaan Sekretaris Daerah. Landasan hukum pembentukannya sangat kokoh, didasarkan pada serangkaian peraturan perundang-undangan, mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2020, dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BKBP.

Mandat yang diemban oleh BKBP sangat fundamental bagi stabilitas sosial dan politik di daerah. Tugas pokoknya adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Fungsi-fungsi utamanya mencakup spektrum yang luas, antara lain: perumusan kebijakan teknis, pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, serta pembinaan kerukunan antarsuku, umat beragama, dan golongan lainnya. Salah satu implementasi

nyata dari mandat ini adalah peran aktif BKBP dalam "mengembangkan kehidupan demokrasi," seperti yang ditunjukkan melalui penyelenggaraan sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula dari kalangan pelajar SMA.

Meskipun struktur organisasi detail yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tidak tersedia dalam dokumen rujukan, peraturan-peraturan sebelumnya memberikan gambaran umum tentang komposisi internalnya. Sebuah badan seperti BKBP lazimnya terdiri dari beberapa komponen utama: seorang Kepala Badan sebagai pimpinan, sebuah Sekretariat atau Sub Bagian Tata Usaha yang menangani urusan administrasi umum dan kepegawaian, serta beberapa Bidang atau Seksi teknis yang menangani fungsi-fungsi spesifik. Contoh bidang teknis yang pernah ada atau relevan dengan mandatnya meliputi Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen serta Sub Bidang Penanganan Konflik. Struktur ini mengindikasikan adanya pembagian kerja antara fungsi administratif-pendukung dan fungsi teknis-operasional.

Dari sisi kepemimpinan, data yang tersedia menunjukkan profil yang homogen secara gender. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang diidentifikasi sebagai Yakobus, seorang laki-laki. Selain itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang, Yustianus, yang memberikan pembinaan teknis administrasi kepada BKBP, juga seorang laki-laki. Ini berarti bahwa pada level pimpinan tertinggi yang terkait langsung dengan operasional dan pengawasan BKBP, representasi sepenuhnya dipegang oleh laki-laki.

Hal ini memunculkan sebuah diskursus penting. Di satu sisi, BKBP memiliki mandat eksternal untuk mempromosikan dan mengembangkan kehidupan demokrasi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kaum muda. Di sisi lain, wajah kepemimpinan internalnya belum mencerminkan keberagaman gender yang menjadi salah satu pilar demokrasi modern. Terdapat potensi disonansi antara nilai-nilai inklusivitas yang diusung dalam program-programnya dengan realitas representasi di tingkat pucuk pimpinannya.

Lebih jauh, analisis terhadap mandat BKBP menunjukkan adanya fungsi-fungsi yang secara historis dan kultural seringkali diasosiasikan dengan peran maskulin. Bidang-bidang seperti "Kewaspadaan Dini," "Kerjasama Intelijen," dan "Penanganan Konflik" secara tradisional merupakan domain yang didominasi laki-laki dalam struktur keamanan dan pemerintahan. Meskipun birokrasi Bengkayang secara keseluruhan memiliki mayoritas perempuan, sangat mungkin distribusi gender di dalam BKBP tidak merata. Ada kemungkinan konsentrasi pegawai perempuan lebih tinggi pada fungsi-fungsi administratif di sekretariat, sementara fungsi-fungsi yang dianggap berisiko tinggi atau terkait keamanan memiliki proporsi laki-laki yang lebih besar. Hipotesis ini menjadi pertimbangan penting dalam menyusun model estimasi komposisi gender internal BKBP yang lebih akurat dan bernuansa.

Bagian 3: Analisis Ketersediaan Data dan Model Estimasi Komposisi Gender Internal BKBP (2024)

Tantangan utama dalam menyusun profil gender BKBP Kabupaten Bengkayang adalah ketiadaan data terpilah yang dipublikasikan secara spesifik untuk lembaga ini. Tidak ada dokumen publik dalam materi rujukan yang menyajikan rincian jumlah pegawai laki-laki

dan perempuan di BKBP, baik menurut jabatan, golongan, maupun tingkat pendidikan. Kesenjangan data ini, bagaimanapun, bukanlah berarti data tersebut tidak ada, melainkan belum tersedia secara proaktif bagi publik.

Ekosistem pengelolaan data kepegawaian di Kabupaten Bengkayang sebenarnya cukup mapan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) berfungsi sebagai lembaga sentral yang mengelola seluruh data ASN di lingkungan pemerintah kabupaten, mulai dari pengadaan, mutasi, hingga pemberhentian. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bengkayang juga telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID Utama, yang berkoordinasi dengan PPID Pelaksana di setiap perangkat daerah, memiliki tugas untuk melayani permohonan informasi dari masyarakat.

Kombinasi antara keberadaan BKPSDM sebagai pengelola data dan PPID sebagai gerbang layanan informasi mengindikasikan bahwa data gender untuk setiap OPD, termasuk BKBP, hampir pasti tercatat dan tersimpan dalam sistem administrasi pemerintahan. Masalahnya terletak pada kebijakan transparansi. Saat ini, model yang diterapkan bersifat reaktif, di mana publik harus secara aktif meminta data melalui prosedur formal. Model yang lebih ideal adalah transparansi proaktif, di mana pemerintah secara berkala mempublikasikan data statistik kepegawaian sebagai bagian dari akuntabilitas publik, sejalan dengan semangat e-Government yang dicanangkan oleh BKPSDM.

Untuk mengatasi kesenjangan data ini, dapat dibangun sebuah model estimasi yang didasarkan pada data kontekstual yang tersedia dan asumsi-asumsi yang logis. Model ini bertujuan untuk memberikan gambaran hipotetis yang paling mendekati realitas mengenai komposisi gender internal BKBP untuk tahun 2024.

Metodologi penyusunan model estimasi adalah sebagai berikut:

1. **Menetapkan Garis Dasar (Baseline):** Model menggunakan rasio gender ASN Kabupaten Bengkayang tahun 2022 (54,4% perempuan dan 45,6% laki-laki) sebagai proporsi target keseluruhan untuk BKBP.
2. **Menggunakan Kerangka Struktural:** Model mengadopsi struktur organisasi generik yang terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, dan beberapa Bidang Teknis, sebagaimana diisyaratkan dalam peraturan-peraturan terkait.
3. **Menerapkan Rasio Berbeda (Nuanced Application):** Berdasarkan analisis di Bagian 2, model ini tidak menerapkan rasio 54,4% secara seragam. Sebaliknya, rasio disesuaikan berdasarkan sifat fungsi. Untuk Sekretariat (fungsi administratif), diasumsikan proporsi perempuan lebih tinggi. Untuk Bidang yang terkait politik dan ideologi, diasumsikan rasio mendekati rata-rata kabupaten. Untuk Bidang yang terkait kewaspadaan dan penanganan konflik (fungsi keamanan), diasumsikan proporsi laki-laki lebih tinggi.
4. **Mengunci Data Pasti (Anchor Point):** Model ini memasukkan satu-satunya data gender yang pasti, yaitu Kepala Badan adalah seorang laki-laki.
5. **Rekonsiliasi:** Jumlah pegawai di setiap unit disesuaikan untuk memastikan total komposisi gender di seluruh badan mendekati rasio garis dasar kabupaten.

Hasil dari penerapan metodologi ini disajikan dalam tabel model estimasi di bawah ini.

Tabel 2: Model Estimasi Distribusi Pegawai BKBP Kabupaten Bengkayang Berdasarkan Gender dan Proyeksi Jabatan (Tahun 2024)

Unit Organisasi / Jabatan	Estimasi Jumlah Pegawai	Estimasi Pegawai Laki-laki	Estimasi Pegawai Perempuan	Catatan / Asumsi
Kepala Badan	1	1	0	Data terkonfirmasi.
Sekretariat (termasuk Sub Bagian)	8	3	5	Rasio disesuaikan untuk fungsi administratif, mayoritas perempuan.
Bidang Ideologi & Wawasan Kebangsaan	6	3	3	Rasio mendekati rata-rata kabupaten, fungsi teknis non-keamanan.
Bidang Politik & Demokrasi	6	3	3	Rasio mendekati rata-rata kabupaten, fungsi teknis non-keamanan.
Bidang Kewaspadaan & Penanganan Konflik	6	4	2	Rasio disesuaikan untuk fungsi terkait keamanan, mayoritas laki-laki.
Jabatan Fungsional Tertentu / Pelaksana	3	1	2	Mengikuti tren umum mayoritas perempuan.
Total	30	15	15	Rasio Total: 50% Laki-laki, 50% Perempuan.

Model ini menghasilkan rasio 50%-50%, sedikit berbeda dari baseline kabupaten (45,6% L-54,4% P). Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh dua faktor utama: (1) posisi Kepala Badan yang dipegang oleh laki-laki memberikan "bobot" lebih pada proporsi laki-laki dalam sebuah lembaga yang relatif kecil, dan (2) adanya bidang teknis dengan fungsi keamanan yang secara logis diasumsikan memiliki lebih banyak personel laki-laki. Model ini, dengan segala keterbatasannya, menyajikan hipotesis yang transparan dan berbasis data mengenai kemungkinan struktur gender internal BKBP, bergerak melampaui pernyataan sederhana bahwa "data tidak tersedia."

Bagian 4: Proyeksi 2024-2025 dan Implikasi Kebijakan

Analisis demografi kepegawaian di Kabupaten Bengkayang tidak bersifat statis. Pemerintah daerah merencanakan sebuah langkah signifikan yang akan mengubah komposisi ASN secara fundamental pada periode 2024-2025. Rencana pengadaan ASN untuk alokasi kebutuhan tahun 2024 mencakup formasi yang sangat besar, yaitu 958 orang untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 199 orang untuk Calon

Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Total penambahan sebanyak 1.157 personel baru ini merupakan sebuah peristiwa demografis transformatif bagi birokrasi Bengkayang.

Jika dibandingkan dengan jumlah total pegawai pada akhir tahun 2022 yang berjumlah 4.461 orang, penambahan 1.157 pegawai baru ini merepresentasikan peningkatan tenaga kerja sekitar 26% hanya dalam satu siklus rekrutmen. Skala rekrutmen ini jauh melampaui penambahan rutin untuk menggantikan pegawai pensiun; ini adalah sebuah ekspansi besar yang akan membentuk ulang profil birokrasi Bengkayang untuk satu generasi ke depan. Keputusan kebijakan terkait rekrutmen ini—mulai dari penentuan formasi, sosialisasi, hingga kriteria seleksi—akan memiliki dampak jangka panjang terhadap keseimbangan gender, profil usia, dan sebaran keahlian di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dengan asumsi bahwa tren pendaftar ASN, terutama untuk formasi non-teknis dan pendidikan, akan terus menunjukkan minat yang lebih tinggi dari perempuan—sebagaimana yang terjadi secara nasional—maka rekrutmen besar-besaran ini kemungkinan besar akan semakin memperkuat mayoritas perempuan dalam korps ASN Kabupaten Bengkayang. Jika proporsi perempuan di antara 1.157 rekrutan baru ini melampaui angka 54,4%, maka pada akhir tahun 2025, persentase total ASN perempuan di Bengkayang akan meningkat lebih jauh.

Implikasinya bagi BKBP sangat jelas. Meskipun BKBP mungkin hanya akan menerima sebagian kecil dari total rekrutan baru tersebut, para pegawai baru ini akan berasal dari sebuah kantong talenta (talent pool) yang didominasi oleh perempuan. Hal ini akan semakin memperkuat atau setidaknya mempertahankan baseline demografis yang sudah cenderung mayoritas perempuan di dalam lembaga tersebut.

Fenomena ini membawa sejumlah implikasi kebijakan yang perlu diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Pertama, adanya mayoritas perempuan di tingkat pelaksana dan fungsional harus diimbangi dengan upaya memastikan jalur karier yang adil menuju jenjang kepemimpinan. Jika tidak, pemerintah berisiko menciptakan fenomena "langit-langit kaca" (glass ceiling), di mana birokrasi memiliki "tubuh" perempuan namun "kepala" laki-laki. Proses mutasi, rotasi, dan promosi pejabat pimpinan tinggi pratama yang telah dilakukan pada tahun 2024 dan 2025 merupakan mekanisme krusial yang harus dievaluasi melalui lensa gender untuk memastikan adanya keterwakilan perempuan yang adil di eselon pimpinan.

Kedua, dengan meningkatnya jumlah ASN perempuan, kebutuhan akan kebijakan di tempat kerja yang responsif gender menjadi semakin mendesak. Ini mencakup, namun tidak terbatas pada, penyediaan fasilitas penitipan anak, penerapan jam kerja yang fleksibel, dan pengembangan budaya organisasi yang mendukung keseimbangan antara tanggung jawab profesional dan keluarga.

Ketiga, representasi numerik harus diterjemahkan menjadi pengaruh substantif. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa suara dan perspektif perempuan terintegrasi dalam setiap tahapan perumusan kebijakan, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Dengan demikian, mayoritas perempuan dalam birokrasi tidak hanya menjadi

data statistik, tetapi menjadi kekuatan pendorong untuk tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat.

Bagian 5: Rekomendasi Strategis untuk Transparansi dan Pengarusutamaan Gender

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap konteks demografi, profil institusional, ketersediaan data, dan proyeksi kepegawaian, laporan ini merumuskan serangkaian rekomendasi strategis yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Rekomendasi ini dirancang untuk menjadi langkah konkret dalam meningkatkan transparansi data dan mendorong pengarusutamaan gender secara sistematis di seluruh lingkungan pemerintahan.

Rekomendasi 1: Implementasi Kebijakan Transparansi Data Proaktif

Pemerintah Kabupaten Bengkayang, melalui BKPSDM, direkomendasikan untuk beralih dari model penyediaan informasi yang reaktif ke model transparansi proaktif.

- **Tindakan:** BKPSDM diamanatkan untuk menyusun dan mempublikasikan "Laporan Statistik Kepegawaian Tahunan" secara berkala di situs web resminya.
- **Rincian:** Laporan ini harus menyajikan data agregat dan terpilah untuk seluruh OPD, termasuk BKBP. Data yang disajikan harus mencakup, minimal, jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, jenjang pendidikan, golongan/ruang, dan klasifikasi jabatan (struktural, fungsional, pelaksana).
- **Justifikasi:** Langkah ini akan mengatasi secara langsung kesenjangan data yang menjadi inti permasalahan dalam laporan ini. Ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan mendukung visi e-Government yang telah dicanangkan. Publikasi data secara proaktif akan mengurangi beban kerja PPID dalam menanggapi permohonan individual dan meningkatkan akuntabilitas publik.

Rekomendasi 2: Pelaksanaan Audit Gender pada Jabatan Pimpinan dan Fungsi Teknis

Untuk memastikan bahwa mayoritas numerik perempuan diterjemahkan ke dalam representasi yang adil di semua tingkatan, direkomendasikan untuk melakukan audit internal.

- **Tindakan:** Pemerintah Kabupaten Bengkayang membentuk tim untuk melakukan audit gender yang berfokus pada representasi perempuan di posisi kepemimpinan (Eselon II, III, dan IV) dan di bidang-bidang teknis yang secara tradisional didominasi laki-laki (misalnya, bidang terkait keamanan, infrastruktur, dan intelijen).
- **Rincian:** Audit ini harus menganalisis data historis dari proses pelantikan dan mutasi pejabat untuk mengidentifikasi pola, potensi hambatan, dan bias sistemik yang mungkin menghalangi kemajuan karier ASN perempuan.

- **Justifikasi:** Audit ini akan memberikan bukti empiris yang diperlukan untuk merancang intervensi kebijakan yang tepat sasaran, seperti program pengembangan kepemimpinan khusus untuk perempuan, skema mentoring, dan penyesuaian kriteria promosi untuk memastikan kesetaraan kesempatan.

Rekomendasi 3: Integrasi Perspektif Gender ke dalam Mandat Inti BKBP

BKBP memiliki peran strategis dalam pendidikan politik dan pembinaan demokrasi. Peran ini harus diperkuat dengan perspektif gender yang eksplisit.

- **Tindakan:** BKBP merevisi dan memperkaya materi program pendidikan politik dan sosialisasi demokrasinya dengan memasukkan modul-modul yang secara spesifik membahas pentingnya partisipasi politik perempuan.
- **Rincian:** Dalam kegiatan sosialisasi bagi pemilih pemula, seperti yang telah dilakukan di Kecamatan Sanggau Ledo, BKBP dapat menyertakan materi tentang pentingnya memilih calon legislatif dan eksekutif perempuan, tantangan yang dihadapi politisi perempuan, dan urgensi kebijakan publik yang responsif gender.
- **Justifikasi:** Rekomendasi ini menciptakan sinergi antara komposisi internal lembaga dengan misi eksternalnya. Dengan menjadi agen aktif dalam mempromosikan kesetaraan gender di ranah publik, BKBP tidak hanya memperkuat mandat demokrasinya tetapi juga melegitimasi pentingnya keseimbangan gender di dalam strukturnya sendiri.

Rekomendasi 4: Prosedur Formal Permohonan Data sebagai Langkah Jangka Pendek

Sambil menunggu implementasi transparansi proaktif, para pemangku kepentingan tetap dapat memperoleh data yang dibutuhkan melalui jalur formal yang ada.

- **Tindakan:** Untuk mendapatkan data gender terpilah yang spesifik untuk BKBP, pemohon informasi dapat mengajukan permohonan resmi kepada PPID Utama Kabupaten Bengkayang.
- **Rincian:** Permohonan harus diajukan secara tertulis dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Permohonan dapat dialamatkan ke Sekretariat PPID di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika atau Sekretariat Daerah, dengan menyebutkan secara spesifik bahwa data yang diminta dikelola oleh BKPSDM Kabupaten Bengkayang. Informasi kontak yang relevan dapat ditemukan di situs web resmi Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- **Justifikasi:** Rekomendasi ini memberikan jalur yang praktis dan dapat segera ditempuh oleh publik untuk mengakses informasi. Pada saat yang sama, pelaksanaan prosedur ini juga berfungsi sebagai pengingat akan beban birokrasi yang dapat dihilangkan melalui kebijakan transparansi data yang proaktif.